



Pengaruh Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Pengembangan Wisata Halal terhadap Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

(Studi Kasus *Pemandian Aek Milas Dano Hutaraja*)

Dewi Sundari Tanjung¹⁾, Yurmaini²⁾, Khoirunnisa Lubis³⁾

^{1), 2), 3)} Universitas Alwasliyah Medan

¹⁾sundaritanjung94@gmail.com, ²⁾yurmainiyus86@gmail.com, ³⁾khoirunnisalubis17@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan pengembangan wisata halal berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuesioner (angket) yang diolah menjadi hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan *teknik total sampling* dan Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pedagang pada objek wisata Aek milas desa Huta Raja yang berjumlah 33 pedagang. Diantaranya pedagang kedai sampah, warung soto, warung lontong, warmindo (warung makan indomi), coffe, dan penjual gorengan. Analisis data penelitian menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil analisis uji parsial (uji t) pengaruh variabel kebijakan BUMDes (X1) terhadap variabel peningkatan pendapatan masyarakat (Y) dengan nilai t hitung sebesar -2,480 t tabel 1,697 dan tingkat signifikansi variabel kebijakan BUMDes (X1) $0,019 < 0,05$. Hasil menunjukkan bahwa variabel kebijakan BUMDes (X1) secara parsial berpengaruh signifikan dan negatif terhadap variabel peningkatan pendapatan masyarakat (Y) Pemandian Air Panas *Aek Milas Dano* Hutaraja. Berdasarkan hasil analisis uji parsial (uji t) pengaruh variabel pengembangan wisata halal (X2) terhadap variabel peningkatan pendapatan masyarakat (Y) dengan nilai t hitung sebesar $7,369 > t$ tabel 1,697 dan tingkat signifikansi variabel pengembangan wisata halal (X2) $0,000 < 0,05$. Hasil menunjukkan bahwa variabel pengembangan wisata halal (X2) secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel peningkatan pendapatan masyarakat (Y) Pemandian Air Panas *Aek Milas Dano* Hutaraja.

Kata Kunci: Bundes, Wisata Halal, Pendapatan

ABSTRACT

This study aims to determine the policies of Village-Owned Enterprises and the development of halal tourism that affect the increase in community income. This study uses quantitative methods. The data used in this study are questionnaire data (questionnaires) which are processed into research results. This study uses a total sampling technique and the population in this study were traders at the Aek Milas tourist attraction in Huta Raja village, totaling 33 traders. Among them are garbage stall traders, soto stalls, lontong stalls, warmindo (Indomi food stalls), coffee, and fried food sellers. Analysis of research data using multiple linear regression. The results of the study show that Based on the results of the partial test analysis (t-test) the effect of the BUMDes policy variable (X1) on the variable of increasing community income (Y) with a t count value of -2.480 t table 1.697 and a significance level of the BUMDes policy variable (X1) $0.019 < 0.05$. The results show that the BUMDes policy variable (X1) partially has a significant and negative effect on the variable of increasing community income (Y) of Aek Milas Dano Hutaraja Hot Springs. Based on the results of the partial test analysis (t-test) the effect of the halal tourism development variable (X2) on the variable of increasing community income (Y) with a calculated t value of $7.369 > t$ table 1.697 and a significance level of the halal tourism development variable (X2) $0.000 < 0.05$. The results show that the halal tourism development variable (X2) partially has a significant and positive effect on the variable of increasing community income (Y) of Aek Milas Dano Hutaraja Hot Springs.

Keywords: Bundes, Halal Tourism, Income



PENDAHULUAN

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif.

Pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah merupakan kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu perlu upaya serius dalam menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut berjalan efektif, efisien, proposional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa.

Adapun Tujuan dan fungsi BUM Desa menurut (Kemendesa PDTT), sebagai berikut: Tujuan Pendirian BUMDes antara lain: 1) Meningkatkan perekonomian desa, 2) Meningkatkan pendapatan asli desa (padesa), 3) Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

BUMDes dalam UU No.6 tahun 2014 merupakan Badan Usaha yang semua atau setengah modalnya dikuasai Desa melewati penyertaan langsung yang bersumber dari kekayaan Desa yang dipisahkan untuk mengatur aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan rakyatnya. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Nurcahya (2019) ialah perangkat pemberdayaan ekonomi lokal yang memiliki beragam jenis usaha yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki setiap Desa. Sedangkan Dewi (2014) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa BUMDes ialah lembaga atau badan perekonomian Desa yang berbadan hukum dibangun dan dikuasai setiap Pemerintah Desa dan dijalankan langsung oleh masyarakat secara ekonomis mandiri dan profesional menggunakan modal semuanya atau sebagian besar dari kekayaan Desa yang disisihkan.

Salah satu kebijakan BUMDes untuk meningkatkan pendapatan masyarakatnya adalah dengan mengelola wisata yang ada dalam Desa/Wilayahnya.

Objek wisata sering dianggap sebagai jawaban untuk menghadapi berbagai masalah ekonomi Indonesia. Kesulitan ekonomi yang diakibatkan oleh ekspor non-migas yang menurun, impor yang naik dan pembangunan ekonomi yang timpang, dipandang dapat diatasi dengan industri pariwisata karena industri pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja baru yang memberikan lebih banyak peluang ekonomi. Industri pariwisata juga menjadi sarana untuk menjaga dan memperbaiki lingkungan dan mendorong pembangunan ekonomi regional. Bagi Indonesia, diharapkan pariwisata dapat menyumbang neraca pembayaran, meningkatkan pengertian internasional, menumbuhkan rasa saling menghormati dan toleransi (Priyadi, 2016).

Perkembangan sektor pariwisata berbasis syariah dalam pengembangan ekonomi pada pariwisata meliputi adat istiadat dan budaya yang melandaskan nilai-nilai Islam dan gaya hidup hingga produk-produk dengan konsep halal anggaran produk adalah dibuat untuk satu anggaran periode produk jadi dan dalam proses (Handayani Rika dkk, 2022).

Pariwisata syariah dipandang sebagai cara baru untuk mengembangkan pariwisata Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan budaya. Selain itu Indonesia juga merupakan Negara mayoritas Islam terbesar di dunia, oleh karena itu sudah seharusnya sektor pariwisata melihat ini sebagai salah satu pasar potensial dengan menggabungkan konsep wisata dan nilai-nilai Islam (Safet Afif, 2020).

Untuk memperbaiki, memajukan, dan meningkatkan kondisi nyata sebuah wilayah, pengembangan pariwisata merupakan bagian dari rencana. Ini bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan baik untuk pemerintah daerah dan tempat wisata di sekitarnya. Dengan mengembangkan dan membangun potensi alam sebuah wilayah, pariwisata akan memberikan banyak pemasukan bagi wilayah yang sadar akan potensinya terhadap industri ini.

Pengembangan pariwisata di suatu wilayah memiliki efek terhadap lingkungan sekitarnya, yang dapat berdampak baik atau buruk. Peningkatan jumlah wisatawan dan pariwisata dapat berdampak, baik positif maupun negatif terutama dalam peningkatan ekonomi yang terlibat dalam industri



pariwisata. Selain dalam bidang perekonomian, berkembangnya sektor pariwisata juga akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat yang tidak hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga dampak negatif. Gaya hidup yang mengalami perubahan dan pergeseran tidak dapat dihindarkan dalam dinamika pariwisata. Pengaruh wisatawan dalam interaksinya dengan pelaku wisata dan masyarakat sangat kental karena setiap hari bersinggungan dan mengamati perilaku wisatawan. Bahkan masyarakat terpencil sekarang dapat merasakan dampak dari pariwisata tersebut.

Wisata Aek Milas di desa Huta Raja adalah salah satu pengembangan wisata terpencil yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitarnya. Aek Milas Dano Hutaraja merupakan sebuah aliran sungai air panas alami yang mengalir dari hutan desa hutaraja, sungai air panas ini dijadikan oleh masyarakat sebagai tempat pemandian untuk menghilangkan lelah setelah beraktifitas seharian. Aek Milas Dano Hutaraja semakin dikenal luas oleh masyarakat luar dari mulut ke mulut sebagai tempat wisata pemandian dan dapat juga dijadikan sebagai pengobatan berbagai macam penyakit. Lokasi Aek Milas Dano Hutaraja yang berada di pinggiran desa Hutaraja dan berbatasan dengan daerah persawahan dan perkebunan masyarakat desa Hutaraja .

Berdasarkan hasil Observasi dan Wawancara, dalam Implementasi Kebijakan BUMDes Desa Hutara peneliti melihat masih belum optimalnya dalam melakukan pengembangan Desa Wisata. dapat dilihat dari pihak Pemerintah Desa Hutaraja masih belum bisa merangkul seluruh masyarakatnya untuk mau ikut serta dan berperan aktif dalam proses Implementasi Kebijakan BUMDes walaupun sudah dilakukannya sosialisasi terhadap masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan beberapa masyarakat kurang sadar adanya penerapan Kebijakan BUMDes di Desa Hutaraja dengan ditunjukkannya respon masyarakat Desa yang tak menghiraukan Kebijakan BUMDes sebelum di kembangkannya Objek Wisata Pemandian Air Panas Saba Dano ini. Selain itu, peneliti juga melihat pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM) BUMDes Hutaraja menunjukkan kurang mendukung dan belum kompeten, karena rasa jiwa sosial yang dimiliki Masyarakat tergolong masih rendah dan

mengakibatkan belum pahamnya mereka pada regulasi sistem Kebijakan BUMDes Hutaraja

Pada teori ini penulis membahas tentang BUMDES banyak pakar yang telah mendefenisikan mengenai arti BUMDES satu di antaranya adalah :

Menurut Eka Prasetya, (2020.9.) Badan usaha milik desa atau disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya di miliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang di pisahkan guna mengelola aset, jasa layanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 213 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa mencantumkan hal ini. Pendirian badan usaha desa ini didukung oleh upaya untuk meningkatkan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (kabupaten/kota) yang memfasilitasi dan melindungi bisnis masyarakat desa dari ancaman pemodal besar. Karena badan usaha milik desa adalah organisasi ekonomi baru yang muncul di pedesaan, mereka masih membutuhkan dasar yang kuat agar dapat berkembang dan maju. BUMDes didirikan oleh pemerintah pusat dan daerah.

BUMDES adalah institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk mengelolanya sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan ekonomi desa. BUMDes dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku dan disepakati oleh masyarakat desa. BUMDes bertujuan untuk meningkatkan ekonomi desa.

Menurut (Pranoto, 2020) tujuan utama pendirian BUMDes, yaitu :

- Meningkatkan perekonomian desa.
- Meningkatkan pendapatan asli desa .
- Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat kesejahteraan desa
- Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Mengembangkan rencana kerja sama antar desa atau dengan pihak ke tiga.
- Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan warga desa.
- Membuka lapangan kerja.



- h. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Berikut ini adalah jenis usaha dan bisnis yang bisa dijalankan BUMDes untuk dapat bermanfaat bagi masyarakat (Suleman et al., 2020):

- a. Usaha social (*sosial business*)
- b. Usaha penyewaan (*renting*)
- c. Usaha dagang dan Usaha Berproduksi (*trending*),
- d. Usaha perantara (*brokering*),
- e. Usaha bersama (*holding*), dijadikan induk dari unit-unit
- f. Kontraktor (*contracting*)

Untuk mewujudkan tujuan dan kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Desa perlu melakukan berbagai strategi. Strategi ini penting agar alokasi, potensi dan sumber daya yang ada di desa dapat diefektifkan untuk mendukung perwujudan pembangunan desa. Dimana pembangunan desa diupayakan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Suleman et al., 2020).

Salah satu strategi pemerintah desa dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang perekonomian adalah dengan mendirikan BUMDes dimana lembaga ini disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa. Pendirian BUMDes pasal 4 PermenDesa Nomor 4 Tahun 2015 disebutkan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes dengan adanya pertimbangan yaitu:

- a. Inisiatif pemerintah desa
- b. Potensi usaha ekonomi desa.
- c. Sumber daya alam di desa.
- d. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes.
- e. Penyertaan modal dari pemerintah desa

Pengelolaan BUMDes juga mengacu kepada peraturan Kemendes No.4 Tahun 2004. Dalam peraturan tersebut, pengelolaan BUMDes meliputi Bentuk Organisasi, Organisasi Pengelola BUMDes, Modal BUMDes, Strategi Pengelolaan BUMDes.

- a. Bentuk organisasi BUMDes

BUMDes dapat membentuk unit-unit usaha antara lain:

- 1) Perseroan terbatas.
- 2) Lembaga Keuangan Mikro dengan 60% porsi BUMDes

- b. Organisasi pengelola BUMDes

Mengacu pada pasal 9 PermenDesa Nomor 4 Tahun 2015 organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelolaan BUMDes terdiri dari:

- 1) Penasehat.
- 2) Pelaksana operasional.
- 3) Pengawas.
 - a) Masyarakat desa yang meliputi jiwa wirausaha.
 - b) Berdomisili dan menetap di desa sekurangnya 2 (dua) tahun.
 - c) Berkepribadian baik, jujur adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa.
 - d) Pendidikan minimal setingkat SMA/Madrasah Aliyah/ SMK atau sederajat.

- c. Modal BUMDes

Modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa. Modal BUMDes terdiri atas penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa. Penyertaan modal desa terdiri atas :

- 1) Hibah dari pihak swasta
- 2) Bantuan pemerintah,
- 3) Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi masyarakat.

- d. Aset Desa Strategi pengelolaan BUMDes

Strategi pengelolaan BUMDes bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUMDes, yaitu meliputi:

- 1) Sosialisasi dan pembelajaran desa tentang BUMDes.
- 2) Pelaksanaan musyawarah desa dengan pokok bahasan tentang BUMDes.
- 3) Pendirian BUMDes yang menjalankan bisnis sosial sosial busines dan bisnis penyewaan renting.
- 4) Analisis kelayakan usaha BUMDes
- 5) Diversifikasi usaha dalam bentuk BUMDes yang berorientasi pada bisnis keuangan financial business, dan usaha bersama holding (Suleman et al., 2020)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga usaha yang dalam pengelolaannya dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat ekonomi desa dan dibentuk atas kebutuhan dan potensi desa yang sudah ada. Wisata Halal

2.1.1.1 Pengertian Wisata

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa objek wisata yaitu suatu tempat yang



menjadi kunjungan wisatawan karena mempunyai sumber daya.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Pariwisata

Host and Guest (1989) dalam Kusumanegara (2009) mengklasifikasikan jenis pariwisata sebagai berikut:

- a. Pariwisata Etnik.
- b. Pariwisata Budaya (*Culture Tourism*),
- c. Pariwisata Rekreasi (*Recreation Tourism*),
- d. Pariwisata Alam (*Eco Tourism*)
- e. Pariwisata Kota (*City Tourism*),
- f. *Rersort City*,
- g. Pariwisata Agro (.

2.1.1.3 Teori Pariwisata dalam Islam

Pariwisata ini bertujuan agar wisatawan termotivasi untuk mendapatkan kebahagiaan dan berkat dari Allah Negara-negara Muslim cenderung menafsirkan pariwisata berdasarkan apa yang Al-Qur'an katakana (Munirah, 2012).

Dalam pandangan Islam pariwisata dikaitkan dengan beberapa konsep sebagai berikut (Jaelani, 2017):

- a. Perjalanan,
- b. wisata dalam Islam adalah untuk belajar ilmu pengetahuan dan berpikir.
- c. Tujuan terbesar dari perjalanan dalam wisata Islam adalah untuk mengajak orang lain kepada Allah dan untuk menyampaikan kepada umat manusia ajaran Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw

a. Lokasi

Lokasi atau obyek wisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek,

b. Promosi

Pariwisata Philip Kotler, 2009 dalam Tasruddin (2015) Promosi adalah bagian dan proses strategi pemasaran sebagai cara untuk berkomunikasi dengan pasar, dengan menggunakan komposisi bauran promosi (*promotional mix*). berusaha merubah tingkah laku dan pendapat.

c. Aksesibilitas

Aksesibilitas Pariwisata sangat berkaitan erat dengan aksesibilitas yang mana berkenaan dengan mudah sulitnya wisatawan untuk mencapai suatu daya tarik wisata di suatu daerah.

2.1.2 Pendapatan Masyarakat

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Indikator pendapatan antara lain (Apriyanti, 2020):

- a. Usia
- b. Curahan Waktu Kerja
- c. Tingkat Pendidikan

Pendapatan adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba. Pendapatan atau upah juga berarti uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Tingkat pendapatan adalah perolehan barang, uang yang diterima atau yang dihasilkan suatu masyarakat tersebut. Tingkatan pendapatan masyarakat pada suatu daerah merupakan salah satu indikator untuk melihat keadaan ekonomi masyarakat tertentu (Dewi, 2021).

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan penelitian menggunakan penelitian secara kuantitatif, Populasi dalam Penelitian ini adalah pedagang pada objek wisata Aek milas desa Huta Raja yang berjumlah 33 pedagang. Diantaranya pedagang kedai sampah, warung soto, warung lontong, warmino (warung makan indomi), coffe, dan penjual gorengan.. Populasi Menurut Sugiono (2020) bahwa Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah Masyarakat yang bedagang di sekitar Objek Wisata Aek milas Hutaraja Kecamatan Panyabungan selatan, Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan hal ini penulis mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sampel dengan *tekhnik total sampling* (Sugiyono, 2020). Sebagai sampel peneliti menggunakan 33 pedagang sebagai sampel penelitian.

Teknik pengumpulan data yang di pakai oleh penelitian ini adalah Observasi, kuisioner Analisis ini menggunakan pendekatan



kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan variable secara apa adanya dan didukung dengan data berupa angka yang dibuat dari situasi sebenarnya (Suryana, 2015) Pengukurannya dilakukan dengan menggunakan *skala Likert*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis bahwa variabel kebijakan BUMDes (X1) dan variabel pengembangan wisata halal (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel peningkatan pendapatan masyarakat (Y). Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi pengaruh variabel kebijakan BUMDes (X1) dan variabel pengembangan wisata halal (X2) secara simultan terhadap variabel peningkatan pendapatan masyarakat (Y) adalah sebesar $0,000 > 0,05$ dan nilai F hitung $28,638 > F$ tabel 5,24, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a di terima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kebijakan BUMDes (X1) dan variabel pengembangan wisata halal (X2) secara simultan terhadap variabel peningkatan pendapatan masyarakat (Y). Berdasarkan hasil dari persamaan regresi nilai pada kolom kedua (*Unstandardized Coefficients*) bagian B pada baris pertama di peroleh model persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut yaitu : $Y = 23,363 + -0,311 X_1 + 0,835 X_2$. Persamaan tersebut dapat diartikan bahwa koefisien arah regresi antara variabel kebijakan BUMDes (X1) dan variabel pengembangan wisata halal (X2) menyatakan adanya pengaruh terhadap variabel peningkatan pendapatan masyarakat (Y). Hasil dari koefisien determinasi (R^2) nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,656 maka koefisien determinasinya = $0,656 \times 100\% = 65,6\%$, artinya bahwa kemampuan variabel kebijakan BUMDes (X1) dan variabel pengembangan wisata halal (X2) secara serentak mampu menjelaskan variabel atau perubahan variabel terikat sebesar 65,6%. Sedangkan sisanya $100\% - 65,6\% = 34,4\%$ ditentukan atau dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Alidis Purnama Dewi (2022) yang berjudul "*Upaya bumdes dalam mengembangkan objek pariwisata Green Bamboo terhadap peningkatan pendapatan masyarakat perspektif islam*". Mengatakan bahwa hasil penelitian

menunjukkan bahwa Dengan adanya pengembangan objek wisata Green Bamboo sudah memberikan dampak positif bagi masyarakat untuk berwirausaha namun belum sepenuhnya dapat mengurangi pengangguran serta meningkatkan pendapatan masyarakat dari profesi sebelumnya.

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan uji t (Parsial) memberikan hasil adalah sebagai berikut yaitu :

Berdasarkan hasil analisis uji parsial (uji t) pengaruh variabel kebijakan BUMDes (X1) terhadap variabel peningkatan pendapatan masyarakat (Y) dengan nilai t hitung sebesar -2,480 t tabel 1,697 dan tingkat signifikansi variabel kebijakan BUMDes (X1) $0,019 < 0,05$. Hasil menunjukkan bahwa variabel kebijakan BUMDes (X1) secara parsial berpengaruh signifikan dan negatif terhadap variabel peningkatan pendapatan masyarakat (Y) Pemandian Air Panas *Aek Milas Dano* Hutaraja.

Penelitian yang dilakukan oleh Sopiayatul Hikmah (2020) yang berjudul "*Peran Badan usaha milik desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat*". Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Peran BUMDes Sabedo dalam membantu mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat sudah cukup berperan walaupun belum maksimal. Dari beberapa unit usaha yang dijalankan BUMDes Sabedo sudah berjalan dengan baik terlihat dari kemudahan masyarakat dalam meminjam modal dalam mengembangkan usahanya.

Berdasarkan hasil analisis uji parsial (uji t) pengaruh variabel pengembangan wisata halal (X2) terhadap variabel peningkatan pendapatan masyarakat (Y) dengan nilai t hitung sebesar $7,369 > t$ tabel 1,697 dan tingkat signifikansi variabel pengembangan wisata halal (X2) $0,000 < 0,05$. Hasil menunjukkan bahwa variabel pengembangan wisata halal (X2) secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel peningkatan pendapatan masyarakat (Y) Pemandian Air Panas *Aek Milas Dano* Hutaraja.

Masyarakat Desa Hutaraja, kecamatan Panyabungan Selatan menyadari bahwa objek wisata pemandian air panas *Aek Milas Dano* sebagai lahan pengembangan wisata halal terkait peningkatan pendapatan masyarakat sangat penting, *Aek Milas Dano* merupakan tempat wisata yang menerapkan konsep wisata syariah yang semakin menunjukkan eksistensinya yang mampu meningkatkan



pendapatan desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat, salah satunya meningkatkan pendapatan masyarakat area *Aek Milas Dano*. Hal ini dikarenakan jika semakin meningkatnya fasilitas sekitar *Aek Milas Dano* yang merupakan salah satu kebijakan BUMDes setempat. Maka pendapatan yang didapatkan masyarakat lebih meningkat setiap bulannya dan memberikan kepuasan pada pelayanan terhadap pengunjung.

Penelitian yang dilakukan oleh Fahrul Rizal (2020) yang berjudul "*Pengaruh Pengembangan Objek Wisata Halal Terhadap Pendapatan Umkm Di Sekitar Masjid Raya Baiturrahman Di Banda Aceh*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial lokasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan UMKM, promosi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan UMKM, aksesibilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan UMKM, sarana dan prasarana berpengaruh signifikan terhadap pendapatan UMKM dan akomodasi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan UMKM. Secara simultan variabel lokasi, promosi, aksesibilitas, sarana prasarana dan akomodasi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan UMKM di Masjid Raya Baiturrahman.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh kebijakan BUMDes dan pengembangan objek wisata halal terhadap peningkatan pendapatan masyarakat ***Pemandian Aek Milas Dano Hutaraja***, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil analisis bahwa variabel kebijakan BUMDes (X1) dan variabel pengembangan wisata halal (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel peningkatan pendapatan masyarakat (Y). Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi pengaruh variabel kebijakan BUMDes (X1) dan variabel pengembangan wisata halal (X2) secara simultan terhadap variabel peningkatan pendapatan masyarakat (Y) adalah sebesar $0,000 > 0,05$ dan nilai F hitung $28,638 > F$ tabel 5,24, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a di terima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kebijakan BUMDes (X1)

dan variabel pengembangan wisata halal (X2) secara simultan terhadap variabel peningkatan pendapatan masyarakat (Y). Berdasarkan hasil dari persamaan regresi nilai pada kolom kedua (*Unstandardized Coefficients*) bagian B pada baris pertama di peroleh model persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut yaitu: $Y = 23,363 + -0,311 X_1 + 0,835 X_2$. Persamaan tersebut dapat diartikan bahwa koefisien arah regresi antara variabel kebijakan BUMDes (X1) dan variabel pengembangan wisata halal (X2) menyatakan adanya pengaruh terhadap variabel peningkatan pendapatan masyarakat (Y). Hasil dari koefisien determinasi (R^2) nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,656 maka koefisien determinasinya = $0,656 \times 100\% = 65,6\%$, artinya bahwa kemampuan variabel kebijakan BUMDes (X1) dan variabel pengembangan wisata halal (X2) secara serentak mampu menjelaskan variabel atau perubahan variabel terikat sebesar 65,6%. Sedangkan sisanya $100\% - 65,6\% = 34,4\%$ ditentukan atau dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

- b. Berdasarkan hasil analisis uji parsial (uji t) pengaruh variabel kebijakan BUMDes (X1) terhadap variabel peningkatan pendapatan masyarakat (Y) dengan nilai t hitung sebesar -2,480 < t tabel 1,697 dan tingkat signifikansi variabel kebijakan BUMDes (X1) $0,019 < 0,05$. Hasil menunjukkan bahwa variabel kebijakan BUMDes (X1) secara parsial berpengaruh signifikan dan negatif terhadap variabel peningkatan pendapatan masyarakat (Y) Pemandian Air Panas *Aek Milas Dano Hutaraja*. Berdasarkan hasil analisis uji parsial (uji t) pengaruh variabel pengembangan wisata halal (X2) terhadap variabel peningkatan pendapatan masyarakat (Y) dengan nilai t hitung sebesar 7,369 > t tabel 1,697 dan tingkat signifikansi variabel pengembangan wisata halal (X2) $0,000 < 0,05$. Hasil menunjukkan bahwa variabel pengembangan wisata halal (X2) secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel peningkatan pendapatan masyarakat (Y) Pemandian Air Panas *Aek Milas Dano Hutaraja*.



- c. Digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara sendiri-sendiri apakah berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika t dihitung $> t$ tabel maka dikatakan signifikan, yaitu terdapat pengaruh antara variabel independen yang diteliti dengan variabel dependen dan sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaida, N. (2023). *Metode penelitian gisi*. PT. Nasya Expanding Manajemen.
- Apriyanti, E. (2020). *Pengaruh Pengembangan Pariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi dusun Ketapang Desa Batu Menyan Kecamatan Teluk Pandan Pesawaran Lampung)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Budiman, & Riyanto, A. (2013). *Kapita Selekta Kuesioner*. Salemba Media.
- Dalimunthe, J. W., Arif, M., & Jannah, N. (2023). Analisis Pengelolaan Wisata Sawah Halal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sidua-Dua Kabupaten Labuhanbatu Utara. *Journal of Islamic Education Management*, 2(2), 276–294.
- Dewi, A. P. (2021). *Upaya Bumdes Dalam Pengembangan Objek Pariwisata Green Bamboo Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Sri Bandung Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara)*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Eddyono, F. (2021). *Pengelolaan Destinasi Pariwisata*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Febrianingrum. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pariwisata Pantai Di Kabupaten Purworejo*. Universitas Sebelas Maret.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indrawati. (2015). *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis*. PT. Refka Aditama.
- Isvananda, M. (2015). *Potensi Pariwisata Di Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan*. Universitas Pendidikan Indonesia.